

Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika, Vol. 3, No. 1, Juni 2020**Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika**

Terakreditasi No: 85/M/KPT/2020 (Sinta 4)

<http://www.stt-tawangmangu.ac.id/e-journal/index.php/fidei>

Vol. 3 No.1 (Juni 2020) hlm: 20-36

e-ISSN: 2621-8135

p-ISSN: 2621-8151

DOI: 10.34081/fidei.v3i1.74

Mennonite Indonesia: Tantangan Bernegara dan Berbudaya Bagi Gereja Injili di Tanah Jawa

Agus Kriswanto

Sekolah Tinggi Teologi Sriwijaya, Indonesia

Email: kriswantoagus@yahoo.com

Diterima: 22 Oktober 2019

Direvisi: 28 Februari 2020

Disetujui: 11 Juni 2020

Abstrak

Sejak awal pembentukannya, warga Gereja Injili di Tanah Jawa bergumul untuk merespons tantangan bernegara dan berbudaya Jawa. Di satu pihak ada kelompok warga yang ingin menjaga kemurnian iman Mennonite dengan menekankan pemisahan antara urusan gereja dan negara, serta menjauhkan diri dari pengaruh budaya; di pihak lain ada kelompok warga yang ingin memberi ruang yang besar bagi keterlibatan bernegara dan berbudaya. Dengan demikian, terjadi kebingungan dalam menyikapi hubungan antara gereja dan negara serta budaya. Tulisan ini bermaksud mengangkat persoalan tentang upaya warga Gereja Injili di Tanah Jawa untuk dapat memberi ruang keterlibatan bernegara dan berbudaya, sambil tetap memelihara identitas iman Mennonite yang diwarisinya. Metode yang digunakan dalam rangka menjawab permasalahan tersebut adalah metode analisis-deskriptif. Analisis dilakukan terhadap materi historis yang merepresentasikan pergulatan sosial-budaya yang dialami oleh warga Gereja Injili di Tanah Jawa.

Kata-Kata Kunci: Mennonite, Negara, Budaya, Jawa, Indonesia

Abstract

Since its shaping, Javanese Evangelical Church (Mennonite) have to respond the challenges of the state and culture of Java. On the one hand, there are groups of the church's member who want to maintain the purity of the

Mennonite faith by emphasizing the separation between church and state affairs, as well as distancing themselves from cultural influences. On the other hand, there are groups of the church's member who want to provide a large space for civic and cultural involvement. Thus, confusion occurs in addressing relationship between the church and the state as well as culture. This article intends to deal with the problem of The Javanese Evangelical Church (Mennonite) to provide a space for civic and cultural involvement, while still maintaining the inherited identity of the Mennonite faith. The method used in order to answer these problems is descriptive-analysis method. Analysis was conducted on historical material that represents the socio-cultural struggle experienced by The Javanese Evangelical Church (Mennonite).

Keywords: *Mennonite; Culture; Javanese; Indonesia; State.*

Pendahuluan

Kaum Mennonite menyadari jati dirinya ketika berhadapan dengan konsep gereja negara. Sebagaimana diartikulasikan oleh Aritonang, kaum Mennonite mendapati dirinya berbeda dari gereja-gereja negara dalam dua hal mendasar, yakni: kodrat kehidupan Kristiani dan kodrat gereja.¹ Mengenai kodrat kehidupan Kristiani, kaum Mennonite menekankan kelahiran baru dan kemuridan. Karena itu, hanya pribadi yang telah bertobat dan siap menjadi muridlah yang layak dibaptis dan mengambil bagian secara penuh dalam gereja. Hal ini berarti bahwa praktik gereja negara yang membaptiskan anak-anak dan orang dewasa yang belum bertobat tidak dapat diterima. Mengenai kodrat gereja, kaum Mennonite menekankan bahwa gereja adalah perhimpunan orang percaya yang bersifat sukarela. Karena itu, penggunaan pedang atau perlengkapan negara untuk memaksakan keinginan gereja sebagaimana dilakukan gereja negara tidak dapat dibenarkan. Kodrat kehidupan Kristiani dan gereja tersebut kemudian diterjemahkan dengan hidup sebagai murid-murid Kristus yang tidak serupa dengan dunia ini, yakni menjalani kehidupan dalam kasih dan anti-kekerasan.² Pemahaman tersebut menyebabkan penekanan pada keterpisahan antara gereja dan negara serta antara gereja dan budaya.

Namun demikian, justru pada jati dirinya inilah gereja Mennonite di Indonesia, khususnya Gereja Injili di Tanah Jawa (selanjutnya, GITJ) mendapatkan tantangan. Sebagai contoh, ada kelompok (terutama generasi

¹ Jan S Aritonang, *Berbagai Aliran Di Dalam Dan Di Sekitar Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 112.

² Ibid.

muda) pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia yang bersifat aktivis dan turut serta memikul senjata. Mereka berupaya terlibat secara penuh dalam bertanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu, ada kelompok jemaat *kejawan* yang dirintis Kyai Ibrahim Tunggul Wulung, yang cenderung bersifat mistis dan menyatu dengan budaya. Mereka memberi ruang yang besar bagi keterlibatan dalam budaya. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menguraikan bagaimana upaya warga GITJ dapat memerhatikan tanggung jawab bernegara dan berbudaya, tetapi tetap memertahankan warisan iman Mennonitenya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri hasil-hasil kajian historis terhadap sejarah gereja dan doktrin Mennonite-Anabaptis. Pada bagian awal pembahasan, akan dijelaskan tentang tantangan dalam merespons hubungan dengan budaya dan negara melalui kajian historis. Deskripsi ini tidak dimaksudkan untuk memberi penjelasan sejarah kronologis, tetapi lebih pada menunjukkan pokok-pokok pergulatan eklesiologis yang dihadapi di dalam konteks budaya Jawa dan negara Indonesia. Berikutnya, akan diuraikan tentang bagaimana warga GITJ dapat memertahankan identitas Mennonite yang memunyai sumbangsih bagi tanggung jawab bernegara dan berbudaya.

Pembahasan dan Hasil

Uraian mengenai berkembangnya Mennonite Jawa ini tidak dimaksudkan sebagai uraian sejarah yang lengkap. Penulis hanya akan menggariskan bagaimana tradisi gereja Mennonite itu bersinggungan dengan konteks masyarakat Indonesia, secara khusus dalam budaya Jawa. Sebab itu, penulisan ini bersifat selektif, untuk melihat tantangan historis-eklesiologi bagi Anabaptis-Mennonite dalam konteks Indonesia. Secara demikian, penulis membagi uraian ke dalam tiga bagian: datangnya tradisi Mennonite ke Jawa, warisan Tunggul Wulung, dan tantangan perjuangan kemerdekaan.

Sebelum membahas tentang keyakinan Mennonite yang dibawa oleh penginjil DZV (*Doopsgezinde Zending Vereeniging*) Belanda, berikut akan dipaparkan terlebih dahulu pokok-pokok ajaran teologi Mennonite. Dengan paparan garis besar tersebut, seseorang dapat beroleh dasar untuk meninjau tantangan yang dihadapi kaum Mennonite dalam konteks Indonesia.

Pokok-pokok Ajaran Mennonite

Meskipun cikal-bakal gerakan Anabaptis menunjukkan banyak varian penekanan, namun apa yang dilakukan oleh Menno Simons dan pengikutnya kemudian dapat dianggap sebagai suatu sintesis atas pergulatan panjang di dalam gerakan Anabaptis awal. Sebab itu, gambar teologis dari gereja Mennonite tidak dapat ditarik lagi ke belakang Anabaptis sebelum Menno, melainkan sebagai hasil konfrontasi dan kompromi setelah Menno. Hal ini tidak berarti bahwa kaum Mennonite yang kemudian tidak mempertimbangkan ulang beberapa pokok dari ajaran Menno yang dinilai kurang memiliki dukungan Alkitabiah.³ Secara demikian, sebagaimana diakui oleh J.C. Wenger, bahwa teologi Mennonite yang definitif belum ada. Upaya yang dapat dilakukan hanyalah semacam ringkasan garis besar dari teologi Mennonite. Apalagi, di dalam sejarah awalnya itu, tokoh-tokoh Anabaptis-Mennonite, termasuk Menno sendiri, tidak membuat suatu tulisan doktrinal yang lengkap. Mereka hanya membuat tulisan-tulisan yang menjawab persoalan-persoalan praktis kehidupan Kristen. Tetapi hal ini sekaligus mengindikasikan ciri khas dari Anabaptis-Mennonite yang lebih bersifat biblis daripada teologis.⁴ Berikut penulis akan memberikan garis besar penekanan teologi Mennonite.

Alkitab

Kaum Mennonite menerima Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sebagai yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Hal ini sejalan dengan para reformator Protestan. Tetapi yang membedakan adalah sikap kaum Mennonite yang lebih mengutamakan fungsi praktis dari Alkitab bagi orang percaya. Daripada menggunakan Alkitab sebagai sarana untuk menyusun suatu sistem teologi, kaum Mennonite memfungsikan Alkitab dalam proses keselamatan dan pengudusan seseorang.⁵ Roh Kudus menggunakan Alkitab untuk membantu manusia melihat kesalahan dan merasa siap untuk kembali ke jalan yang benar sebagaimana digambarkan dalam Alkitab.⁶ Di samping itu, kaum Mennonite menekankan ketaatan kepada perintah dalam Alkitab secara radikal tanpa

³ Cornelius J Dick, *An Introduction to Mennonite History* (Scottsdale: Herald Press, 1993), 146. Sebagai contoh, pandangan Menno tentang inkarnasi Yesus yang menganggap bahwa Kristus hanya memiliki tubuh sorgawi yang disediakan Allah. Sebab jika Kristus memiliki tubuh dari Maria, maka ia dapat berdosa dan tidak dapat menebus dosa.

⁴ J C Wenger, *Glimpses of Mennonite History and Doctrine* (Scottsdale: Herald Press, 1959), 137.

⁵ Ibid.

⁶ J C Wenger, *What Mennonites Believe* (Scottsdale: Herald Press, 1991), 15.

dihilangi oleh faktor eksternal yang membelenggu kebebasan hati nurani. Mereka menolak untuk mendasarkan iman Kristen pada otoritas gereja ataupun tradisi.

Penyataan Allah dimulai dari Perjanjian Lama dan diperdalam dengan kedatangan Yesus Kristus. Pusat pesan Alkitab adalah Yesus Kristus. Karena itu, Perjanjian Lama mesti dibaca dari perspektif Perjanjian Baru. Penyataan Allah melalui Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru adalah final dan lengkap.⁷

Pemisahan Gereja dan Negara

Perhatian utama Anabaptis adalah pada sifat gereja dan kedudukannya di dalam masyarakat. Hal yang paling disoroti adalah bahwa gereja dan negara haruslah terpisah. Baik gereja maupun negara, ditetapkan oleh Allah. Negara berfungsi untuk menegakkan hukum di dalam masyarakat yang sebagian besar bukan Kristen. Sedangkan gereja adalah sebuah persekutuan di mana laki-laki dan perempuan mengasihi Tuhan dan sesamanya. Orang Kristen bertobat dari kejahatan karena keinginan sukarela untuk mengikut Kristus dan bukan karena dipaksa dengan ancaman. Fungsi gereja di sini adalah untuk pemberitaan Injil dan pengasuhan Kristen.

Seseorang masuk ke dalam negara oleh karena kelahiran secara jasmaniah. Berbeda dari itu, seseorang masuk ke dalam gereja karena kelahiran baru secara rohani. Negara meliputi semua orang, baik yang benar maupun yang jahat, tetapi gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah berkomitmen untuk berjalan dalam kebangkitan bersama Kristus. Sejalan dengan itu, gereja tidak boleh menggunakan kekerasan dalam menjalankan fungsinya. Memang, pemahaman tentang penggunaan kekerasan dan kekuatan negara ini tidak seragam dalam gerakan Anabaptis mula-mula, tetapi secara berangsur, terutama Anabaptis Swiss dan Belanda, memahami diri sebagai gereja yang damai.

Anti-klerikalisme

Lebih lanjut, karena penerapan imamat am orang percaya, gereja merupakan suatu persaudaraan yang egaliter. Hal ini bertentangan dengan sifat hierarkis dari gereja Katolik pada abad pertengahan. Hierarki semacam ini meresahkan kaum Mennonite. Mereka melihat bahwa Yesus mengajarkan dalam Matius 23:89 kepada murid-murid-Nya untuk tidak menggunakan sebutan guru atau bapa, karena “kamu hanya mempunyai satu guru, dan kamu semua adalah

⁷ Ibid.

saudara.” Gereja merupakan sebuah komunitas yang saling menerima dan menghormati dalam satu level. Tidak ada perbedaan kelas terkait pendidikan, ras, ataupun kekayaan.

Di dalam gereja, kebesaran memiliki arti kapasitas untuk mengasihi dan melayani, dan bukan memaksakan otoritas atau penghargaan dan status. Oleh karenanya, pelayan di dalam gereja tidak dimaksudkan sebagai yang berada di atas yang lain. Tetapi, pelayan adalah seseorang yang dipercayakan untuk menggembalakan jemaat dan bertanggung jawab untuk setia mengajarkan Firman.⁸

Disiplin Gereja

Oleh karena gereja merupakan persekutuan murid-murid yang berkomitmen mengikut Yesus, maka setiap bentuk tindakan kembali kepada dosa dianggap sebagai hal yang memerlukan pemulihan. Dalam hal inilah, disiplin gereja diperlukan. Gereja harus berupaya sedapat mungkin (tanpa kekerasan) untuk membawa kembali anggotanya yang jatuh ke dalam dosa agar kembali ke jalan yang benar.⁹ Apabila orang tersebut terus menerus bertahan di dalam dosanya, maka perlu diberitahukan kepadanya bahwa ia menempatkan dirinya sendiri di luar batas gereja (pengakuan iman Dordrecht, artikel XVI).

Namun demikian, dalam menjalankan disiplin gereja ini, yang dipikirkan bukanlah sebuah penghukuman, melainkan sebagai alat untuk mengafirmasi, menyemangati, dan mengoreksi yang dilakukan dalam kasih kepada anggota gereja. Disiplin gereja menolong orang untuk lebih setia, sebagai saksi dan murid yang efektif. Dalam hal ini teks Alkitab yang dipakai untuk mendasari tindakan disiplin gereja di antaranya: Matius 18 dan Roma 12.¹⁰

Ketetapan

Mewarisi sikap anti-sakramentalisme abad ke-16 yang ditujukan kepada gereja Katolik, kaum Anabaptis-Mennonite menolak pemahaman Katolik tentang sakramen. Oleh karena itu, kaum Mennonite hanya menyebut beberapa upacara gerejawi sebagai simbol ataupun ketetapan (*ordinance*). Ada beberapa ketetapan yang dilakukan, di antaranya: baptisan, perjamuan, dan pembasuhan kaki.

⁸ Wenger, *What Mennonites Believe*.

⁹ Donald B. Kraybill, “Plain Reservations: Amish and Mennonite Views of Media and Computers,” *Journal of Mass Media Ethics* 13, no. 2 (1998): 99–110.

¹⁰ Wenger, *What Mennonites Believe*.

Kaum Mennonite tidak memandang baptisan dalam pengertian magis memanggil Roh Kudus untuk masuk ke dalam hidup orang percaya. Tetapi, baptisan adalah cara orang Kristen menunjukkan komitmen kepada Allah melalui Yesus Kristus dan membuka hatinya untuk kehadiran Roh Kudus. Baptisan hanyalah simbol eksternal atas realitas rohani di dalam diri orang percaya.

Dalam baptisan seseorang dapat melihat makna gambaran pembasuhan dosa. Air melambangkan pembersihan dari dosa. Ketika seseorang bertobat dan percaya pada Kristus dengan kekuatan Roh Kudus, ia berbalik dari dosanya dan mati bagi dosa. Namun ia juga bangkit bersama Kristus dalam hidup yang baru. Baptisan air melambangkan kematian dan kebangkitan dalam hidup baru itu.

Sejalan dengan pemahaman tentang hakikat gereja sebagai persekutuan orang yang mengaku percaya, maka baptisan orang percaya hanya dilakukan kepada orang dewasa. Anak-anak yang belum dapat mengaku percaya tidak dapat dibaptis. Zwingli dan reformator Protestan mencela penolakan terhadap baptisan anak dengan anggapan bahwa hal itu menghalangi anak untuk diselamatkan.¹¹ Kaum Anabaptis menanggapi bahwa tidak ada pernyataan di Alkitab bahwa anak-anak yang belum dibaptis akan dibinasakan. Anak-anak adalah bagian dari umat manusia yang untuknya Kristus telah mati. Pengorbanan Kristus telah menutupi dosa anak-anak, sampai mereka menjadi dewasa dan bertanggung jawab untuk menerima pekerjaan penyelamatan Kristus. Karena itu, anak-anak secara rohani selamat. Kepada anak-anak bukanlah dilakukan penginjilan, karena mereka belum tersesat. Kepada mereka hanya dilakukan pengasuhan dan pengajaran tentang Allah dan hidup di dalam Kristus, hingga nantinya mereka siap untuk berkomitmen bagi Allah. Kaum muda Mennonite umumnya dibaptis pada usia belasan, tetapi selalu atas permintaannya sendiri tanpa paksaan.¹² Hal ini berkaitan dengan sifat sukarela dari keanggotaan gereja.

Lebih lanjut, Perjamuan Kudus merupakan pengingatan atas pengorbanan Kristus bagi orang berdosa. Roti yang dipecahkan sebagai pengingat akan tubuh dan anggur yang diminum sebagai pengingat akan darah-Nya yang tumpah. Dalam hal ini, kaum Anabaptis menolak pemahaman transubstansiasi dari gereja Katolik maupun konsubstansiasi dari Lutheran. Mereka juga tidak menolak

¹¹ James Urry, "Who Are the Mennonites?," *European Journal of Sociology* 24, no. ue 02/November (1983): 241–262.

¹² Wenger, *What Mennonit Believe*.

sikap sakramentalisme yang menganggap bahwa sakramen Perjamuan Kudus adalah sarana memperoleh keselamatan.¹³

Lebih jauh, roti yang dibagi-bagi melambangkan kesatuan rohani semua orang yang memakannya dengan Kristus. Sebelum mengikuti Perjamuan Kudus, seseorang haruslah dimasukkan dalam persekutuan melalui baptisan orang percaya. Perjamuan ini mengandung makna komunal dan sosial yang sangat dalam di antara anggotanya. Perseteruan antar anggota mestilah diselesaikan dan didamaikan secara penuh sebelum berbagi dalam pelayanan perjamuan.

Kaum Mennonite juga mengengal tradisi pembasuhan kaki, sesuai dengan kesaksian Yohanes 13:14-15. Yesus memerintahkan supaya murid-murid melakukan pembasuhan kaki seperti yang sudah dicontohkan-Nya terhadap mereka. Bagi kaum Mennonite, pembasuhan kaki ini melambangkan kasih dan kesetaraan. Yesus mencela para murid yang ingin berebut menjadi yang terbesar di antara saudara. Namun, melalui pembasuhan kaki ini, Yesus mengajarkan kepada murid-murid-Nya untuk tidak mengutamakan status ataupun prestise.¹⁴

Kehidupan Kristen

Kadang-kadang ada anggapan bahwa nama Anabaptis (baptis ulang) menunjukkan penekanan gerakan ini pada baptisan. Hal ini kurang tepat, karena baptisan hanya dianggap sebagai simbol luar dari peristiwa rohani yang terjadi di dalam diri seseorang. Inti dari kekristenan, menurut Anabaptis, bukanlah pada sakramen atau juga pada rumusan sistem teologi. Tetapi, sebagaimana ditegaskan Wenger, "The essence of Christianity was thought of as discipleship, a faithful "following-after" (nachfolge) of Christ, a resolute obedience to the ethical demands of the New Testament."¹⁵

Rumusan ajaran yang benar tentu saja penting, tetapi hal itu tidak cukup. Memang hanya iman yang menyelamatkan, tetapi di mana tidak ada kemuridan maka tidak ada iman yang menyelamatkan. Karena itu, menerapkan gaya hidup sebagai murid Yesus merupakan suatu keharusan bagi orang yang percaya. Sebagai murid Yesus, seseorang mewujudkan kasih dan sikap anti-kekerasan.

Zending DZV Sebagai Pembawa Ajaran Mennonite di Indonesia

DZV merupakan perhimpunan pekabar Injil dari aliran Mennonite Belanda. Thomas van den End meringkaskan bahwa:

¹³ Wenger, *Glimpses of Mennonite History and Doctrine*.

¹⁴ Wenger, *What Mennonites Believe*.

¹⁵ Wenger, *Glimpses of Mennonite History and Doctrine*.

“Aliran ini ditandai oleh ciri menjauhi kehidupan politik dan budaya, memantang pemakaian kekerasan (tidak mau masuk tentara atau mengangkat senjata biar untuk mempertahankan diri sekalipun), menganut paham baptisan pada umur dewasa, mementingkan otonomi jemaat-jemaat tersendiri, dan mempertahankan disiplin gereja yang ketat.”¹⁶

Bagi van den End, sebenarnya ciri aliran Mennonite tersebut tidak terlalu berbeda dari aliran pietis abad ke-19 yang memengaruhi lembaga-lembaga pekabaran Injil lainnya yang bekerja di Indonesia. Hanya ciri pemantangan kekerasan dan baptisan dewasalah yang membuatnya agak berbeda. Dengan nada agak negatif, van den End memandang bahwa baptisan dewasa ini menghalangi upaya mencapai kesatuan gerejawi.¹⁷ Mengenai ciri pemantangan kekerasan, menurut van den End, tidak dipegang teguh lagi khususnya di Indonesia ketika para pemudanya turut mengangkat senjata melawan penjajah.¹⁸

Pieter Janz, sebagai utusan DZV di Indonesia, membawa pemahaman khas Mennonite tersebut. Sebelum berangkat ke Jawa, Janz menerima pelajaran teologi dari Profesor Jan van Gilse yang mengajar di Seminari Mennonite Amsterdam. ¹⁹ Pemahaman Mennonitenya tampak, misalnya, pada pembaptisan-pembaptisan pertama yang dilakukan Janz. Sebelum membaptis, Janz selalu berusaha melakukan penyaringan dengan ketat. Baginya, baptisan tidak semata-mata untuk mendapatkan anggota sebanyak-banyaknya, tetapi memastikan apakah orang tersebut benar-benar telah percaya dan layak dibaptis.²⁰ Hal ini sesuai dengan keyakinan Mennonite bahwa baptisan adalah tanda percaya yang hanya dapat dilakukan kepada orang-orang yang telah mengerti, percaya, dan menunjukkan perbuatan yang selaras dengan pengakuannya. Orang dewasa yang telah membuat komitmen personal kepada Kristus inilah yang menjadi anggota gereja.²¹ Setiap anggota gereja harus memiliki komitmen pribadi (iman) kepada Kristus.

¹⁶ Thomas End, *Ragi Carita 2: Sejarah Gereja Di Indonesia 1860-an – Sekarang* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 231.

¹⁷End, *Ragi Carita 2: Sejarah Gereja Di Indonesia 1860-an – Sekarang*. Dalam hal ini, seseorang dapat memaklumi sudut pandang van den End yang dipengaruhi oleh latar belakang Calvinisnya, yang mempraktekkan baptisan anak

¹⁸ Ibid.

¹⁹ S.H.Sukoco L.M. Yoder, *Tata Injil Di Bumi Muria: Sejarah Gereja Injili Di Tanah Jawa* (Pati: Pustaka Muria, n.d.), 120.

²⁰ L.M. Yoder, *Tata Injil Di Bumi Muria: Sejarah Gereja Injili Di Tanah Jawa*.

²¹ Wenger, *Glimpses of Mennonite History and Doctrine*.

Terlepas dari kritik beberapa ahli tentang kurang jitunya strategi yang diterapkan Janz dalam pekabaran Injil kepada orang Jawa, Janz telah menunjukkan kemurnian pemahaman Mennonite yang dibawanya dari Belanda. Kemurnian tradisi Mennonite yang dibawa Janz ini juga tampak dalam perselisihannya dengan Tunggul Wulung, yang menurutnya cenderung bercampur kejawen. Sebab itu, sekitar tahun 1854, Janz menolak permintaan Tunggul Wulung untuk dibaptis.²² Namun, tiga tahun kemudian, Tunggul Wulung dibaptis oleh Jellesma di Mojowarno. Setelah itu, Tunggul Wulung pun mempunyai lebih banyak pengikut dibanding Janz. Tunggul Wulung mempraktekkan gaya kekristenan yang agak berbeda dengan Janz.

Tradisi Kristen-Jawa Tunggul Wulung

Asal-usul Tunggul Wulung sukar untuk dipastikan. Menurut tradisi lisan, Tunggul Wulung merupakan keturunan bangsawan dari keraton Mangkunegaran, Solo.²³ Dalam perjalanan hidupnya, Tunggul Wulung terobsesi mencari *ngelmu* Jawa untuk mendapatkan ketenangan batin. Pencarian *ngelmu* inilah yang kemudian mengantarnya untuk mengenal kekristenan.

Tunggul Wulung berupaya memadukan iman Kristen dengan budaya Jawa.²⁴ Hal ini bertolak belakang dengan tradisi Mennonite yang diajarkan oleh Janz. Bagi Tunggul Wulung, banyak segi budaya Jawa yang tidak bertentangan dengan iman Kristen. Justru, Tunggul Wulung mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak meninggalkan budaya Jawa. Ia memahami kekristenan dari sudut pandang masyarakat Jawa. Sebagai contoh, Tunggul Wulung mengizinkan penggunaan rapalan-rapalan yang dimaknai secara Kristen. Selain itu, ia memahami bahwa Injil sebagai kabar baik, memberikan kelepasan dari berbagai belenggu dan ancaman yang sangat ditakuti oleh masyarakat Jawa. Bagi orang Jawa, hal yang menakutkan bukanlah terutama penghukuman dari Tuhan, melainkan kuasa-kuasa jahat yang terdapat di sekitarnya, setan-setan, tenung, *ngelmu-ngelmu* jahat, kerja paksa dan perbudakan yang melanda kehidupan masyarakat Jawa pada waktu itu.²⁵ Menurut Tunggul Wulung, pelepasan dari segala bentuk belenggu dan ancaman tersebut ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa jahat dan segala penguasa dunia.

²² End, *Ragi Carita 2: Sejarah Gereja Di Indonesia 1860-an – Sekarang*.

²³ L.M. Yoder, *Tata Injil Di Bumi Muria: Sejarah Gereja Injili Di Tanah Jawa*.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

Dengan cara memahami kekristenan dalam konteks budaya Jawa, para pengikut Tunggul Wulung merasa tidak sejalan dengan pola kekristenan yang diajarkan Janz sebagai misionaris Mennonite. Mereka menggunakan sebutan yang bernada ejekan untuk pengikut Janz sebagai 'Kristen Londo'. Sedangkan para pengikut Tunggul Wulung sendiri menamai diri mereka 'Kristen Jowo', yaitu kekristenan yang bukan berdasar atas budaya barat atau budaya asing lainnya, tetapi bertujuan mengerti kekristenan dengan dasar-dasar budaya Jawa.²⁶ Kekristenan kejawen yang merupakan hasil pemberitaan Tunggul Wulung ini tersebar di daerah Banyutowo, Tegalombo (Tayu-Pati), dan Bondo (Jepara).²⁷

Dengan demikian, seseorang dapat melihat bahwa di antara kekristenan asuhan Janz dan Tunggul Wulung terdapat perbedaan yang signifikan dalam cara pandang terhadap budaya. Tampaknya Tunggul Wulung tidak menyadari asal-usul historis dari sikap 'anti-budaya' yang diterapkan oleh Janz, yang merupakan warisan gerakan Anabaptis dan Mennonite sejak abad ke-16. Tunggul Wulung bermaksud menangkap makna kekristenan yang diterima dari sudut pandang budaya kekiniaannya sendiri. Ia mengira bahwa berita Injil itu berbicara terhadap keprihatinan yang dihadapi oleh dirinya, masyarakat dan budayanya pada waktu itu. Sedangkan Janz, entah disadari atau tidak, tampaknya menaruh prasangka negatif terhadap budaya lokal, sebagai yang dapat mengaburkan pesan kekristenan. Namun demikian, uniknyanya, kedua cara pandang yang berlainan tersebut melebur dalam wadah GITJ. Persoalan hubungan antara gereja dan budaya ini terus menjadi pokok pengumpulan di GITJ.

Gerakan Nasionalisme Kaum Muda

Selanjutnya, ada persoalan yang muncul tentang hubungan antara gereja dan negara. Hal itu tampak, mula-mula, pada perselisihan antara kaum tua dan kaum muda yang tak terelakkan di masa perang kemerdekaan.²⁸ Sejak Soekarno-Hatta, pada tanggal 17 Agustus 1945, memroklamirkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, semangat revolusi menjalar ke seluruh pelosok tanah air. Para pemuda, tanpa melihat latar belakang golongan, pendidikan, maupun agama, bahu membahu menyerang markas-markas Jepang. Setelah Jepang dikalahkan oleh sekutu, bentrokan berlanjut dengan Belanda yang ingin kembali

²⁶ Ibid.

²⁷ Tim Penyusun P P A GITJ, *Pokok-Pokok Ajaran Gereja Injili Di Tanah Jawa* (Pati: Sinode GITJ, 2007), 10.

²⁸ L.M. Yoder, *Tata Injil Di Bumi Muria: Sejarah Gereja Injili Di Tanah Jawa*.

berkuasa di Indonesia. Dalam situasi tersebut, para pemuda Kristen, termasuk yang di sekitar Muria, terdorong untuk turut berjuang memikul senjata.

Sikap para pemuda ini berlawanan dengan angkatan tua yang hanya menyaksikan revolusi tersebut dengan tetap berpegang pada azas Mennonite tentang pemisahan gereja dan negara, perang dan kekerasan.²⁹ Sikap angkatan tua ini rentan disalahpahami oleh orang-orang non-Kristen pada masa itu. Sikap menolak terlibat dalam revolusi ini dipahami sebagai sikap acuh tak acuh dan menyudutkan orang Kristen seolah-olah memihak kepada Belanda.

Setelah melalui perselisihan tajam, akhirnya para pemuda berhasil memenangkan niatnya untuk turut serta dalam perjuangan memertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam Sidang Sinode III pada 20 Oktober 1945, di Pati, diputuskan bahwa golongan tua dipersilakan memertahankan gereja dengan doa dan kebaktian, sedangkan golongan muda ditugaskan mencari jalan agar gereja tidak terlibat dalam kesukaran politik, dengan adanya dakwaan dari golongan lain bahwa gereja sebagai mata-mata dan membantu Belanda.³⁰ Meskipun dengan berat hati, keputusan tersebut memberi lampu hijau kepada warga gereja, terutama pemuda, untuk menabrak tradisi Mennonite yang diwarisi selama ini. Sebagaimana dipaparkan di atas, dalam tradisi Mennonite, gereja dipisahkan secara total dari urusan negara atau politik. Selain itu, pantang hukumnya bagi warga gereja untuk melakukan kekerasan. Atas dasar ajaran tersebut, warga Mennonite tidak dibenarkan menjadi tentara, yang menggunakan senjata dalam tugasnya.

Hasil Sidang Sinode III tersebut kelihatannya menjadi cikal bakal penyesuaian ajaran Mennonite tentang gereja dan kodrat kehidupan Kristiani dalam konteks bergereja di Indonesia. Sebagai contoh, dalam “Pokok-pokok Ajaran GITJ” tidak terdapat larangan bagi warganya untuk menjadi tentara atau polisi. Bahkan, memberi peluang kepada warganya secara individual untuk terjun ke dalam politik praktis, dengan memberi pembinaan khusus.³¹

Keterlibatan gereja (atau setidaknya para pemudanya) dalam perang perjuangan kemerdekaan ini sempat menjadi pergumulan identitas diri Mennonite pada masa itu. Dalam Sidang Sinode V tahun 1949, pokok jati diri ini mendapat sorotan. Kepada utusan dari Gereja Mennonite Belanda yang diwakili Daniel Amstutz, Ds. S. Djojodiharjo (mewakili PKD-SM/GITJ), menyampaikan pertanyaan bahwa apakah mereka masih dapat dianggap

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ GITJ, *Pokok-Pokok Ajaran Gereja Injili Di Tanah Jawa*.

Mennonite, sebab mereka telah turut dalam perang kemerdekaan? Terhadap pertanyaan ini, Daniel Amstutz menyatakan bahwa bagaimana pun gereja sekitar Muria masih dianggap bagian dari persaudaraan dalam lingkungan Mennonite.³²

Menggereja Mennonite di Indonesia

Dari sejarah berkembangnya GITJ di Indonesia itu, tampak adanya persoalan menyangkut hubungan antara gereja dan budaya serta hubungan antara gereja dan negara. Persoalan ini memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Pertama, adanya tantangan yang berkenaan dengan budaya sebagaimana terjadi pada kasus Tunggal Wulung. Sikap Mennonite terhadap budaya pada dasarnya berkaitan dengan pandangan terhadap hakikat gereja dan kehidupan Kristen itu sendiri. Gereja dipahami sebagai orang-orang yang mengaku percaya, berkomitmen sebagai murid, dan membentuk ‘masyarakat’ baru yang sesuai dengan firman Allah. Sebagaimana dikatakan Wenger bahwa kaum Anabaptis-Mennonite bermaksud membentuk sebuah masyarakat Kristen di dalam gereja. Masyarakat Kristen ini berupaya hidup dengan gaya hidup barunya yang berbeda dari masyarakat umum.³³ Jika ditinjau dari model-model berteologi kontekstual, sikap kaum Mennonite ini dapat dikategorikan dalam model ‘budaya tandingan’. Model budaya tandingan memandang budaya sebagai yang bersifat ambigu dan berlawanan dengan Injil.³⁴ Perjumpaan Injil dengan budaya senantiasa bersifat mengkritik dan mengoreksi kecenderungan melawan Kristus. Namun demikian, sikap ini tidak berarti acuh tak acuh atau tidak memedulikan budaya. Justru, sikap ini terlibat aktif dalam perjumpaan dengan budaya, dalam rangka memperbarui dan menunjukkan alternatif Kristianinya. Memang sikap yang demikian mengandung bahaya, apabila tidak berhati-hati, jatuh pada sikap sektarianisme, eksklusivisme, dan monokulturalisme. Sebab itu, model budaya tandingan, dalam menawarkan alternatif budaya perlu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap batas-batas lunak antara Injil dan budaya yang bergantung konteks.³⁵

Bagi penulis, sikap kaum Mennonite dengan model budaya tandingan ini dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Dengan keterlibatan, pengamatan

³² L.M. Yoder, *Tata Injil Di Bumi Muria: Sejarah Gereja Injili Di Tanah Jawa*.

³³ Wenger, *Glimpses of Mennonite History and Doctrine*.

³⁴ Stephen B Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2002), 218–236. Bevans mendaftarkan nama lain dari model ini: model kontras, model profetis

³⁵ Firman Panjaitan and Hendro Hariyanto Siburian, “Misi Kristologi Dalam Konteks Kebudayaan,” *LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta* 1, no. 1 (2019): 42–59.

dan penilaian yang jeli terhadap budaya lokal maupun kebiasaan hidup secara nasional, kaum Mennonite dapat menunjukkan gaya hidup sebagai murid Yesus yang memberi alternatif pembaruan. Sebagai contoh, terhadap budaya korupsi yang meluas di berbagai lini kehidupan berbangsa, kaum Mennonite dapat memberikan suara dan tindakan profetisnya dengan menunjukkan gaya hidup jujur dan berintegritas, setidaknya di dalam komunitasnya (gereja) terlebih dahulu. Gaya hidup sebagai murid Yesus yang diupayakan dan ditunjukkan oleh gereja dapat menjadi model bagi dunia sekitar.

Kedua, tantangan yang berkenaan dengan tanggung jawab sebagai warga negara. Pada masa perang kemerdekaan, para pemuda Kristen terpaksa memikul senjata untuk turut memertahankan kemerdekaan. Hal ini memicu pertentangan etis tentang kekerasan dan perang. Sejak tahun 1525, gereja Mennonite telah memegang prinsip non-resisten. Conrad Grebel, Sebagai pendiri gereja Persaudaraan Swis mengatakan bahwa, *"True, believing Christian are as sheep in the midst of wolves....They use neither the worldly sword nor engage in war, since among them taking human life has ceased entirely, for we are no longer under the Old Covenant."*³⁶ Prinsip etis anti-kekerasan ini didapatkan dari ayat-ayat Alkitab yang memerintahkan kasih tanpa syarat dan sikap anti-kekerasan (Mat. 5:38-48; Luk. 6:27-36; Rm. 12:17-21; dsb). Dengan berdasar sikap anti-kekerasan itu, maka gereja Mennonite menolak penggunaan kekerasan dalam kehidupan privat dan kemiliteran dalam berbagai bentuknya.

Kaum Mennonite juga menolak menjadi polisi ataupun hakim. Mereka menolak untuk bertindak sebagai hakim. Bagi mereka, panggilan Kristen adalah untuk memberitakan Injil, bukan untuk mewujudkan keadilan dalam negara. Mereka memang menghargai negara, bahwa negara bertindak mewujudkan keadilan di tengah dunia yang jahat. Tetapi hal itu adalah murni tugas negara, dan bukan tugas gereja atau orang Kristen.

Secara etis, kaum Mennonite membedakan antara etika negara dan etika bagi orang Kristen. Etika bagi negara adalah baik dan perlu untuk menjalankan tugas negara. Sedangkan, etika Kristen adalah untuk orang Kristen, bukan untuk negara. Dengan demikian, cara menjalankan fungsi kenegaraan sangat berbeda dengan cara menjalankan fungsi gereja. Negara dapat menggunakan jalan kekerasan, sedangkan gereja tidak boleh. Hal yang boleh bagi gereja menyikapi

³⁶ Wenger, *Glimpses of Mennonite History and Doctrine*.

orang yang bersalah hanyalah dengan teguran dan pengucilan jika tidak ada pertobatan.³⁷

Kaum Mennonite secara radikal menarik garis pembedaan yang keras antara etika negara dan etika Kristen. Oleh karena itu, sulit bagi kaum Mennonite untuk membenarkan warganya yang terjun dalam tugas kenegaraan, terutama yang bersinggungan dengan kekerasan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak mungkin orang yang sama (misalnya sebagai militer), pada satu sisi memertahankan etika Kristen yang menolak kekerasan, tetapi di sisi lain, harus mengangkat senjata dalam tugasnya.

Menurut penulis, prinsip anti-kekerasan ini masih dapat dipegang oleh seorang anggota militer sekalipun. Tetapi, prinsip itu dipahami sebagai prinsip batiniah yang bukan hanya diukur dari tindakan lahiriah saja, tetapi juga dari sikap hati. Sebagai contoh, seorang anggota gereja Mennonite yang menjadi polisi, hakim, ataupun militer dapat memegang teguh prinsip anti-kekerasan, dengan cara selalu mencari jalan perdamaian. Penggunaan kekerasan hanya dimungkinkan sebagai *ultima ratio* (jalan terakhir), jika keadaan sangat mendesak untuk mewujudkan perdamaian. Dengan itu, anggota militer ataupun polisi dapat mengedepankan cara-cara persuasif dalam mengendalikan kejahatan.

Bagi orang Kristen (Mennonite) yang merupakan masyarakat sipil, yang tanpa hak memegang senjata, dan tidak berwenang mengambil tindakan pengendalian dengan persenjataan, maka penggunaan kekerasan sama sekali tidak diperkenankan. Hal ini didasarkan pada tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat sipil tersebut. Dengan pemahaman yang demikian, kaum Mennonite tetap dapat memertahankan kemurnian imannya, sekaligus dapat menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara sesuai dengan kebutuhannya.

Lebih lanjut, orang Kristen di Indonesia dipanggil untuk menyatakan identitasnya sebagai pengikut Kristus di tengah kehidupan bergereja, bernegara, dan bermasyarakat. Identitas Kristiani itu lahir dari penghayatan iman yang otentik, sehingga tidak dapat dikompromikan. Namun, orang Kristen juga memiliki visi bagi dunia secara keseluruhan, yakni sebuah dunia yang penuh damai, kasih dan keadilan. Karena itu, orang Kristen terdorong untuk mengupayakan hidup damai dengan cara-cara yang pro-kehidupan dan anti-kekerasan. Memerjuangkan identitas Kristiani tidak dilakukan dengan cara-cara yang justru mengingkari identitas dan visi dunia yang penuh damai.

³⁷ Ibid.

Seorang etikus Kristen, Reinhold Niebuhr, berpendapat bahwa seorang Kristen dapat menolak pasifisme dan menyetujui perang. Sikap ini didasarkan pada pendapatnya bahwa hukum kasih yang terdapat dalam Perjanjian Baru tidak dapat diterapkan dalam kondisi manusia yang penuh dosa.³⁸ Macgregor menyanggah pandangan Niebuhr tersebut dengan menunjukkan bahwa Niebuhr hanya melihat fakta dosa dalam diri manusia, tanpa melihat dimensi penebusan yang menjadikan manusia berdosa itu sebagai kawan sekerja Allah.³⁹

Menurut penulis, visi perdamaian sebagai suatu kondisi tanpa peperangan merupakan petunjuk arah pelayanan orang Kristen. Meskipun, kesempurnaannya baru akan terjadi pada saat Kristus datang kembali. Dalam batas tertentu, perang atau penggunaan kekerasan dapat ditolerir sebagai *ultima ratio* (jalan terakhir) dalam kasus yang sangat khusus dan hanya bagi yang berwenang. Namun hal ini tidak dapat digeneralisir, apalagi menjadi kebiasaan. Sebagaimana ditekankan rasul Paulus, “sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang” (Roma 12:18).

Hal tersebut sejalan dengan Pokok-Pokok Ajaran GITJ yang memberi ruang bagi warganya untuk menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam *Pokok-pokok Ajaran GITJ* yang terbaru, tidak terdapat larangan bagi warganya untuk menjadi tentara atau polisi. Bahkan, memberi peluang kepada warganya secara individual untuk terjun ke dalam politik praktis, dengan memberi pembinaan khusus.⁴⁰ Hal ini berarti bahwa GITJ tidak memahami warisan ajaran Mennonite secara kaku. Tetapi mampu menunjukkan kelenturan dalam menghargai kebutuhan konteks Indonesia.

Simpulan

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa menyangkut hubungan dengan budaya, warga GITJ dapat menghargai budaya meskipun tetap dengan sikap kritis. Unsur-unsur budaya dipelajari dengan baik sehingga dapat dinilai mana yang perlu dipelihara dan dikembangkan serta unsur mana yang harus ditinjau ulang. Dalam hal ini, perlu dihindari praduga negatif terhadap budaya sebelum mempelajari secara seksama. Bertolak dari respons penuh penghargaan terhadap budaya itu, warga GITJ dapat mengembangkan sebuah

³⁸ G H C Macgregor, *Relevansi Dari Suatu Idealisme Yang Mustahil*”, ed. Walter Wink (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 39.

³⁹ Macgregor, *Relevansi Dari Suatu Idealisme Yang Mustahil*”.

⁴⁰ GITJ, *Pokok-Pokok Ajaran Gereja Injili Di Tanah Jawa*.

budaya lokal yang mengusung nilai-nilai Kristiani. Kedua, menyangkut hubungan dengan negara, warga GITJ dapat memerhatikan dan melibatkan diri dalam kehidupan bernegara sesuai dengan kapasitasnya. Warga GITJ dapat menjadi aparatur negara, baik sipil maupun militer, sambil tetap mengedepankan upaya membangun perdamaian. Dengan cara tersebut, ketegangan yang kreatif antara mempertahankan identitas iman Mennonite dengan upaya menggereja kontekstual dapat terpelihara keseimbangannya.

Daftar Pustaka

- Aritonang, Jan S. *Berbagai Aliran Di Dalam Dan Di Sekitar Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Bevans, Stephen B. *Model-Model Teologi Kontekstual*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2002.
- Dick, Cornelius J. *An Introduction to Mennonite History*. Scottdale: Herald Press, 1993.
- End, Thomas. *Ragi Carita 2: Sejarah Gereja Di Indonesia 1860-an – Sekarang*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.
- GITJ, Tim Penyusun P P A. *Pokok-Pokok Ajaran Gereja Injili Di Tanah Jawa*. Pati: Sinode GITJ, 2007.
- Kraybill, Donald B. "Plain Reservations: Amish and Mennonite Views of Media and Computers." *Journal of Mass Media Ethics* 13, no. 2 (1998): 99–110.
- L.M. Yoder, S.H.Sukoco. *Tata Injil Di Bumi Muria: Sejarah Gereja Injili Di Tanah Jawa*. Pati: Pustaka Muria, n.d.
- Macgregor, G H C. *Relevansi Dari Suatu Idealisme Yang Mustahil*". Edited by Walter Wink. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Panjaitan, Firman, and Hendro Hariyanto Siburian. "Misi Kristologi Dalam Konteks Kebudayaan." *LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta* 1, no. 1 (2019): 42–59. <https://doi.org/10.37731/log.v1i1.19>.
- Urry, James. "Who Are the Mennonites?". *European Journal of Sociology* 24, no. ue 02/November (1983): 241–262.
- Wenger, J C. *Glimpses of Mennonite History and Doctrine*. Scottdale: Herald Press, 1959.
- . *What Mennonit Believe*. Scottdale: Herald Press, 1991.